

# PERAN PARAPIHAK DALAM PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT; STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN

## *The Role of Stakeholders in Peat Land Utilization; Case Study at Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra*

Oleh/By :

**Edwin Martin & Bondan Winarno<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Balai Penelitian Kehutanan Palembang  
Jl. Kolonel Burlian Km. 6,5 Pundi Kayu, Palembang  
Telp. 0711 414864 Fax. 0711 414864  
email: abinuha<sup>^</sup>876yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Tree based peat land rehabilitation is still rare effort either from its program and its succes. This research aims to answer general question on how tree based peat land rehabilitation could be supported by stakeholders, through case study at Ogan Komering Ilir Regency. Stakeholder analysis and institutional assessment were employed to select and assess proper actors and institutional factors enabled collective action on dealing with peat land. High social acceptance on commodity or bussiness type as well as its bussiness feasibility were identified as main factors that should be considered for enabling collective action on future tree based peat land rehabilitation program at Ogan Komering Ilir.*

*Keywords: Peat land rehabilitation, enabling incentives, collective action*

### ABSTRAK

Rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon masih merupakan upaya yang langka, baik dari sisi program maupun keberhasilannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan umum tentang bagaimana menjadikan program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon dapat didukung oleh parapihak, melalui studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Analisis stakeholder dan faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang mendukung aksi kolektif pemanfaatan lahan gambut digunakan sebagai metode dalam mencari pemungkin terjadinya dukungan parapihak terhadap upaya rehabilitasi. Penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas sebuah jenis usaha adalah faktor pemungkin dominan yang layak diperhatikan agar terjadi aksi kolektif dalam program rehabilitasi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kata kunci: Rehabilitasi lahan gambut, insentif pemungkin, aksi kolektif

## I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yakni sekitar 21 juta hektar yang tersebar terutama di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Lahan gambut

---

<sup>1</sup>Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Palembang, email: abinuha1976@yahoo.co.id

paling luas di Indonesia terdapat di Sumatera (Wahyunto *et al.*, 2005). Di Pulau Sumatera, penyebaran lahan gambut umumnya terdapat di sepanjang pantai timur, yaitu di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Lampung. Di Sumatera Selatan, lahan gambut terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yakni seluas 769 ribu hektar (Wahyunto *et al.*, 2005). Luas lahan rawa termasuk gambut dan danau di Kabupaten OKI mencapai sekitar 75 persen dari total luas wilayahnya (Pemkab OKI dan PPMAL Unsri, 2006).

Sebagaimana kebanyakan lahan gambut di Indonesia, awalnya lahan gambut di OKI ditutupi oleh hutan rawa gambut yang unik, dengan jenis-jenis tumbuhan seperti Ramin, Jelutung, Kempas, Punak, Pulai, dan Meranti. Praktik pengusahaan hutan yang tidak berkelanjutan dan kebakaran hutan telah mengubah hutan gambut menjadi lahan alang-alang terbuka, semak belukar atau danau-danau kecil. Kini, sebagian besar lahan gambut tersebut telah sedang dalam proses menjadi kebun kelapa sawit (Zulfikhar, 2006; Lubis, 2006).

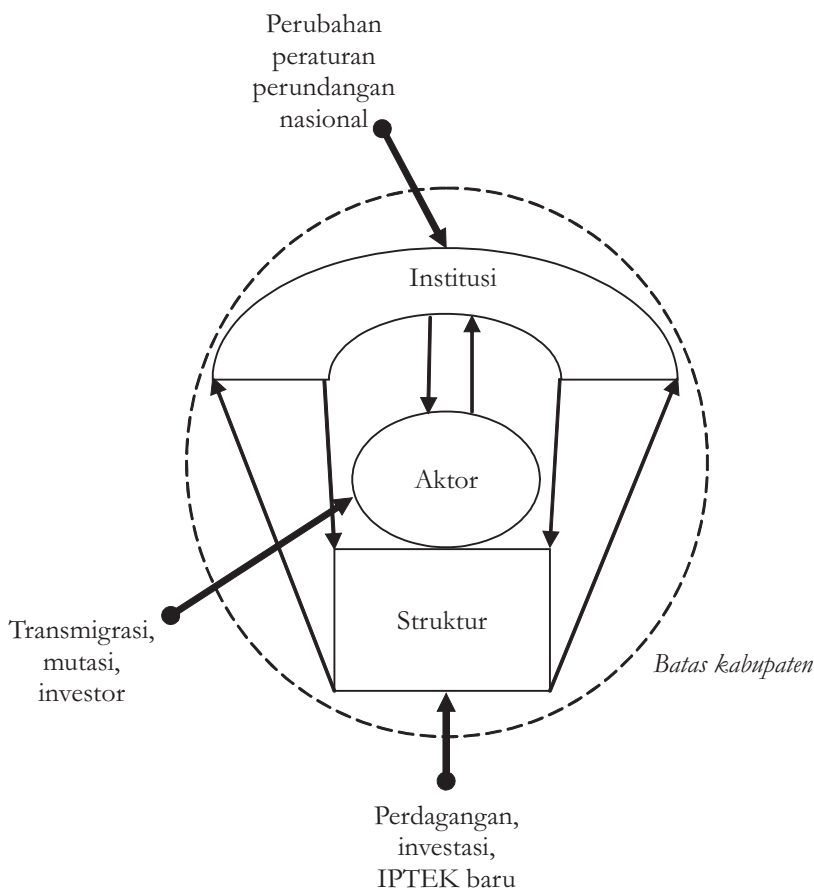
Rehabilitasi adalah kata kunci dari tesis yang dikemukakan banyak ahli rawa gambut untuk dapat memperbaiki lahan gambut yang telah rusak menuju keadaan atau fungsi semula. Sebagai contoh, Wibisono *et al.* (2005) dan Daryono (2006) merekomendasikan penanaman kembali (reboisasi) dengan jenis-jenis yang cocok untuk lahan gambut yang kondisinya telah terbuka, baik pada lahan dengan kedalaman gambut kurang dari tiga meter atau lebih. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon masih merupakan upaya yang langka, baik dari sisi program maupun keberhasilannya. Sampai dengan tahun 2008, upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten OKI tidak lebih dari 50 hektar dan cenderung hanya didukung oleh sektor kehutanan saja (Dinas Kehutanan Kabupaten OKI, 2008; hasil wawancara).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan umum tentang bagaimana menjadikan program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon dapat didukung oleh parapihak (*stakeholders*), melalui studi kasus di Kabupaten OKI. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang sebaiknya dilibatkan dan faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang layak diperhatikan sebagai pemungkin terjadinya dukungan parapihak (aksi kolektif) terhadap upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon.

## II. BAHAN DAN METODE

### 2.1. Kerangka pikir, lokasi dan waktu penelitian

Kerangka pikir utama yang digunakan dalam mengkaji insentif pemungkin bagi terjadinya aksi kolektif rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten OKI ini adalah konsep SIA (*Structure, Institution, Actors*). Pendekatan SIA ini sangat berguna dalam menganalisis perubahan ekonomi dan dampak-dampak yang ditimbulkannya (Sato, 2005). Struktur (S) dalam pendekatan SIA adalah arena tempat parapihak bermain/bertindak, Institusi (I) adalah aturan-aturan formal dan informal yang berlaku, dan Aktor (A) merupakan parapihak yang terlibat (Gambar 1).



Gambar 1. Pendekatan Structure, Institution dan Actors (SIA) (Sato, 2005; dimodifikasi)  
Figure 1. Structure, Institution and Actors Metod (Sato, 2005; modified)

Taraf analisis dalam penelitian ini adalah satu kabupaten dalam hal ini Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). *Structure*, *Institution* dan *Actors* dalam Kabupaten OKI dipengaruhi unsur-unsur di luar kabupaten. Perubahan peraturan perundangan nasional atau provinsi akan mempengaruhi I dalam kabupaten OKI. Karakteristik aktor-aktor yang terlibat dalam pemanfaatan lahan gambut, baik jumlah maupun kapasitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transmigrasi, mutasi atau penggantian pejabat, atau masuknya investor dari luar kabupaten. Struktur (*playing field*) dalam Kabupaten OKI dapat berubah apabila terjadi perubahan variabel perdagangan, investasi, maupun ditemukannya IPTEK baru.

Objek lahan gambut yang diangkat dalam penelitian adalah lahan gambut yang berada di luar kawasan hutan dan tidak berada dalam penguasaan perorangan. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis keterlibatan banyak pihak di Kabupaten OKI dalam pengaturan dan pemanfaatan lahan gambut tersebut. Selain itu, lahan gambut seluas

kurang lebih 585.425 Ha yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten OKI telah diusahakan oleh 3 (tiga) pemegang izin usaha hutan tanaman, yaitu PT. SBA Wood Industries, PT. Bumi Andalas Permai, PT. Bumi Mekar Hijau untuk ditanami *Acacia crassicarpa*. Izin konsesi hutan tanaman industri berada di luar kewenangan pemerintah daerah kabupaten OKI.

Elemen-elemen penyusun Struktur (S) dan Institusi (I) diperoleh dari hasil analisis faktor-faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang dianggap parapihak mendukung preferensi pemanfaatan lahan mereka, sedangkan para pihak yang terlibat (A) dapat diketahui melalui analisis stakeholder. Mengingat perkembangan dan sejarah pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI masih relatif baru (dimulai setelah tahun 2000-an), maka dilakukan komparasi terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar)<sup>2</sup>, Provinsi Jambi yang telah memiliki sejarah pemanfaatan lahan gambut cukup lama (sejak era kolonial Belanda). Selain itu, komparasi ini akan meluaskan dimensi pilihan modus terjadinya aksi kolektif bagi rehabilitasi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Bulan September 2008 hingga Januari 2009. Guna mendapatkan informasi langsung dari aktor-aktor yang dipilih oleh masing-masing institusi, waktu penelitian disesuaikan dengan kesediaan mereka untuk dapat melakukan wawancara tatap muka.

### 2.3. Metode pengumpulan dan analisis data

#### 2.3.1. Stakeholder

Stakeholder atau parapihak adalah setiap individu, kelompok, organisasi, atau institusi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh individu, kelompok, organisasi, atau institusi (Mitroff dan Linstone, 1993). Metode sampling bola salju (*snowball sampling*) digunakan untuk mendapatkan parapihak yang memiliki kepentingan dan atau pengaruh dalam pemanfaatan lahan gambut.

Metode ini dimulai dengan observasi di lapangan mengenai bentuk pemanfaatan lahan gambut yang paling umum ditemui, kemudian ditentukan siapa individu, kelompok, organisasi yang berkaitan langsung dengan fenomena tersebut. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap individu atau wakil dari kelompok dan organisasi guna mendapatkan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak dalam pemanfaatan lahan gambut.

Nilai peubah kepentingan dan pengaruh parapihak didapatkan dari hasil total nilai pembobotan (*scoring*) pada masing-masing indikator peubah. Peubah kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak dijabarkan ke dalam 5 (lima) indikator, berupa jawaban atas pertanyaan terbuka. Jawaban aktor parapihak pada setiap indikator peubah diberi bobot (*scoring*) berdasarkan Skala Likert, yaitu nilai 1 (sangat lemah), 2 (lemah), 3 (sedang), 4 (kuat/tinggi), 5 (sangat kuat/tinggi), sehingga nilai tertinggi peubah baik kepentingan maupun pengaruh setiap pihak adalah 25.

---

<sup>2</sup>Dipilihnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi sebagai kabupaten pembanding adalah dengan pertimbangan kemiripan karakter lahan gambut (Wahyunto *et al.*, 2005) dan informasi awal tentang perbedaan modus pemanfaatan lahan gambut antara Kabupaten OKI dengan Tanjabar.

Tingkat kepentingan dan pengaruh parapihak ditampilkan dalam bentuk matrik, guna memetakan kepentingan dan pengaruh relatif dari parapihak kunci. Cara ini bermanfaat dalam memutuskan siapa yang semestinya dilibatkan, dikonsultasikan atau diinformasikan dalam sebuah aktifitas (Matsaert, 2002).

### **2.3.2. Faktor-faktor Kelembagaan dan Sosial Ekonomi**

Faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang mempengaruhi tindakan pemanfaatan lahan gambut didapatkan dari hasil evaluasi para pihak, melalui metode survei. Metode survei mengikuti pola metode sampling bola salju yang dilakukan untuk menentukan parapihak. Survei dilakukan dengan cara wawancara untuk pengisian kuesioner terstruktur.

Kuesioner dirancang berdasarkan modifikasi faktor-faktor kelembagaan kunci yang disebutkan dalam prinsip-prinsip perancangan kelembagaan lestari untuk rejim pengelolaan sumberdaya milik umum (*Design principals for robust Common Property Resources Regime*) yang disusun oleh Ostrom (1990) dalam Agrawal (2001), da Silva (2004), dan Quinn *et al.* (2007) dan faktor-faktor sosial ekonomi keberhasilan pengelolaan kehutanan masyarakat yang dibuat oleh Thomson dan Freudenberger (1997). Faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi ini berperan sebagai struktur atau arena dalam pemanfaatan lahan gambut.

Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Menurut Meinzen-Dick *et al.* (2004), analisis data secara kualitatif adalah sangat berguna untuk mengawali kajian tentang aksi kolektif, terutama pada saat manifestasi aksi kolektif dan parapihak kunci tidak dipahami. Berbeda dengan analisis data kuantitatif semacam analisis multivariate yang berusaha menentukan faktor-faktor utama yang berpengaruh, analisis kualitatif lebih fleksibel dan memberi ruang lebih luas bagi peneliti maupun pengambil kebijakan untuk menentukan peubah-peubah yang dianggap berpengaruh dalam aksi kolektif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil Penelitian**

#### **3.1.1. Identifikasi dan Pemetaan Parapihak**

Hasil observasi lapangan di Kabupaten OKI menunjukkan bahwa bentuk umum pemanfaatan lahan gambut di areal bukan kawasan hutan adalah perkebunan kelapa sawit. Sementara, di Kabupaten Tanjabar sebagian besar lahan gambut dimanfaatkan dalam bentuk perkebunan campuran beragam komoditas (padi, palawija, pinang, kelapa, kopi rawa, pohon buah) yang dilakukan oleh masyarakat. Observasi lapangan ini menjadi dasar bagi identifikasi para pihak pada masing-masing kabupaten. Hasil inventarisasi menggunakan teknik *snowball* menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan gambut bervariasi antar kabupaten (Tabel 1).

Tabel 1. Parapihak dalam pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan dan Tanjabar, Jambi

Table 1. List of stakeholder for utilization of peatland in OKI Regency South Sumatra and Tanjabar, Jambi Province

No.	OKI	No.	Tanjabar
1.	Dinas Perkebunan ( <i>Crop Estate Service</i> )	1.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan ( <i>Plantation and Forest Service</i> )
2.	Dinas Kehutanan ( <i>Forestry Service</i> )	2.	Kantor Lingkungan Hidup ( <i>Environmental Service</i> )
3.	DPRD Kabupaten ( <i>District House of Representative</i> )	3.	Bappeda ( <i>Local Planning Agency</i> )
4.	Badan Lingkungan Hidup ( <i>Environmental Agency</i> )	4.	DPRD Kabupaten ( <i>District House of Representative</i> )
5.	Bappeda ( <i>Planning Agency</i> )	5.	Dinas Perikanan dan Kelautan ( <i>Ocean and Fishery Service</i> )
6.	BPPMD ( <i>Investment Agency</i> )	6.	Dinas Pertanian dan Peternakan ( <i>Pasture and Agricultural Service</i> )
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan ( <i>Ocean and Fishery Service</i> )	7.	Desa Bram Hitam Kanan ( <i>Bram Hitam Kanan Village</i> )
8.	Dinas Pertanian ( <i>Agricultural Service</i> )		
9.	KODIM 0402 OKI ( <i>District Military Service</i> )		
10.	BPPM ( <i>Investment Agency</i> )		
11.	Dinas Peternakan ( <i>Livestock Service</i> )		
12.	Disnakertrans ( <i>Employment and Resettlement Service</i> )		
13.	PT. Gading Cempaka Graha		
14.	PPMAL Unsri		
15.	Desa Tanjung Beringin ( <i>Tanjung Beringin Village</i> )		

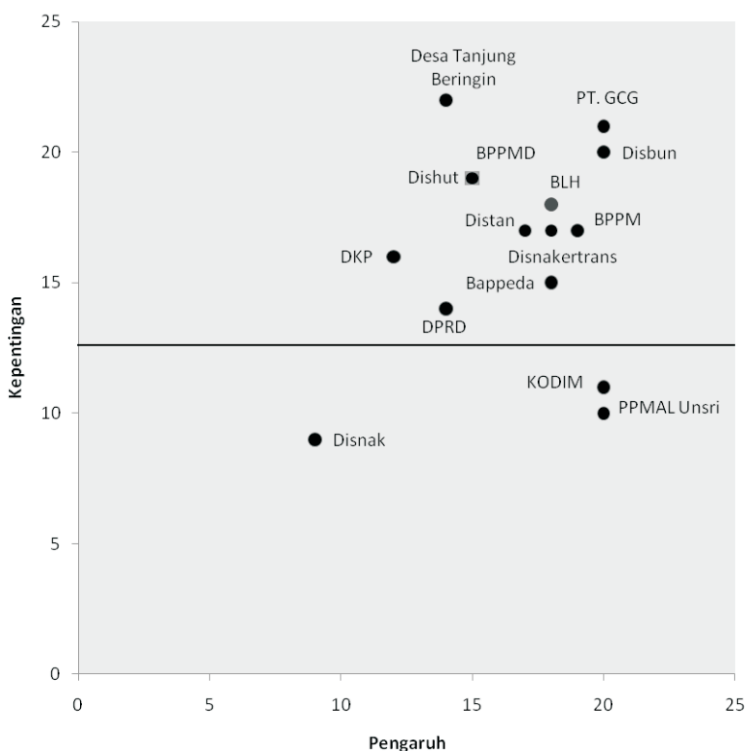
<sup>1</sup>Keterangan (*Remarks*): BPPMD = Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa<sup>2</sup>, BPPM = Badan Perizinan dan Penanaman Modal<sup>3</sup>, Disnakertrans = Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<sup>4</sup>, PPMAL Unsri = Pusat Penelitian Manajemen Air dan Lahan Universitas Sriwijaya<sup>5</sup>

Pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI melibatkan lebih banyak parapihak dibandingkan dengan Kabupaten Tanjabar, Jambi. Ini dapat terjadi karena masyarakat di Tanjabar telah sejak lama (era kolonial Belanda) dan mampu mandiri dalam memanfaatkan lahan gambut. Sementara, lahan gambut di OKI mulai dimanfaatkan sejak adanya Program Transmigrasi Lahan Basah pada era tahun 1970-an namun tidak meluas (hanya untuk Kecamatan Air Sugihan). Pemanfaat lahan gambut di OKI bertambah banyak setelah masuknya investor untuk perkebunan kelapa sawit pada era tahun 2000-an.

Makin menyempitnya lahan kering yang dapat dimanfaatkan sebagai areal ekonomi produktif, mekanisme perizinan yang lokalitas, banyaknya kejadian kebakaran di areal lahan gambut, ketertinggalan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut adalah alasan-alasan yang mengundang keterlibatan banyak pihak, terutama sektor-sektor pemerintah daerah untuk turut andil dalam pemanfaatan lahan gambut di OKI. Biaya pemanfaatan lahan gambut yang relatif lebih mahal dibanding pengolahan lahan kering adalah alasan bagi pemerintah untuk membuka pintu bagi masuknya perusahaan swasta. Bagi perusahaan perkebunan, areal lahan gambut yang luas dan belum

dimanfaatkan adalah peluang untuk dapat menguasai lahan dalam skala luas.

Parapihak memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda dalam kasus pemanfaatan lahan gambut. Apabila tingkat pengaruh dan kepentingan dikombinasikan, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk gambar matriks, maka dapat dilihat ilustrasi mengenai fenomena penelitian yang terjadi berkenaan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh untuk seluruh parapihak secara bersamaan (Gambar 2). Nilai pengaruh dan kepentingan didapatkan dari penjumlahan hasil pembobotan (*scoring*) menggunakan Skala Likert atas jawaban pihak atas 5 (lima) pertanyaan indikator pengaruh dan kepentingan. Matriks ini menggambarkan posisi masing-masing pihak dalam pemanfaatan lahan gambut.



Gambar 2. Matriks resultante hasil analisis parapihak Kabupaten OKI

Figure 2. Resultante matrix of analysis results of stakeholders in OKI regency

Posisi kuadran I (*Subjects*) pada Kabupaten OKI ditempati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Kuadran ini menunjukkan bahwa DKP memiliki kepentingan yang tinggi namun pengaruhnya masih rendah. Bagi DKP lahan gambut merupakan alternatif untuk pengembangan sektor perikanan masa depan, namun kini belum ditemukan teknik budidaya yang tepat. DKP adalah sektor yang perlu diberdayakan dalam pemanfaatan lahan gambut masa mendatang.

Kuadran II (*players*) merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi. Kuadran II ditempati oleh 11 (sebelas) pihak. Banyaknya pihak yang berperan sebagai *players* adalah potensi besar dalam pemanfaatan lahan gambut. Ini berbeda dengan kasus pemanfaatan lahan gambut di Tanjabar, dimana *players* yang ada berjumlah 5 (lima) pihak saja dan masyarakat berada pada posisi pemanfaat yang kuat.

Kuadran III (*bystanders*) ditempati oleh Dinas Peternakan (Disnak). Disnak memiliki kepentingan dan pengaruh paling rendah karena menganggap lahan rawa gambut belum menjadi areal yang tepat untuk pengembangan peternakan. Ini dapat berimplikasi kurang diperhatikannya urusan peternakan jika pemanfaat gambut hendak mengembangkan peternakan.

Parapihak yang berperan sebagai unggulan *players* seperti Dinas Perkebunan (Disbun), Desa Tanjung Beringin, PT. Gading Cempaka Graha (GCG) dapat sangat berperan dalam membantu keberhasilan program lainnya di lahan gambut, misalnya Program Rehabilitasi. Mereka dapat dipastikan akan secara terus menerus berinteraksi dan memiliki kepedulian dengan lahan gambut.

Kuadran IV (*Actors*) ditempati oleh KODIM 0402 OKI dan PPMAL Unsri untuk kasus pemanfaatan gambut OKI. Mereka terbukti cukup berpengaruh dalam mengubah kebijakan dan keadaan lahan gambut di OKI. KODIM 0402 OKI pernah dapat mengkoordinasi banyak pihak untuk membantu mereka membuka areal gambut rawan terbakar menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat. Hasil studi PPMAL Unsri dijadikan panduan dalam pemanfaatan lahan gambut Kabupaten OKI. Kepentingan Program Rehabilitasi dapat bersinergi dengan pihak KODIM 0402 OKI dan PPMAL.

Parapihak yang teridentifikasi dan telah dipetakan di atas merupakan mereka yang secara langsung berperan dalam pemanfaatan lahan gambut. Namun demikian terdapat pula pihak lain yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi pemanfaatan lahan gambut secara temporer, misalnya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (DPUP). DPUP kurang berpengaruh dan tidak memiliki kepentingan dalam pilihan usaha di lahan gambut, namun dapat membantu pembukaan kanal (saluran air) yang diperlukan untuk usaha produktif di areal lahan gambut.

### 3.1.2. Faktor-faktor Kelembagaan dan Sosial Ekonomi

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh individu-individu pengambil keputusan setiap pihak menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara preferensi dengan fakta umum bentuk pemanfaatan lahan gambut yang kini ada (Tabel 2). Parapihak di OKI didominasi oleh mereka yang beranggapan bahwa kelapa sawit adalah jenis usaha yang paling tepat untuk dikembangkan di lahan gambut. Pemikiran ini sejalan dengan fakta lapangan yang ada saat ini bahwa sebagian besar lahan gambut yang dikuasai oleh negara telah dan akan diperuntukan bagi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, di Kabupaten Tanjabar perkebunan campuran<sup>3</sup> yang banyak ditemui pada lahan-lahan gambut yang diusahakan masyarakat adalah juga menjadi preferensi dominan parapihak.

<sup>3</sup> Perkebunan campuran atau kebun campuran adalah sebutan umum masyarakat untuk kebun yang ditanami dengan beragam komoditas, seperti pinang, kelapa dalam, kopi, dan lain-lain



Tabel 2. Perbandingan antara preferensi parapihak terhadap bentuk pemanfaatan lahan gambut dengan fakta umum di lapangan

Table 1. Comparison between stakeholder reference on peatland utilization and the fact in the field

Kabupaten OKI		Kabupaten Tanjabar	
Preferensi (n) ( <i>Preference</i> )	Fakta umum ( <i>General fact</i> )	Preferensi (n) ( <i>Preference</i> )	Fakta umum ( <i>General fact</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelapa sawit (<i>Oil palm</i>) (33)</li> <li>▪ Sawah (<i>Rice field</i>) (5)</li> <li>▪ Pertanian non sawah (<i>Non rice agricultural</i>) (14)</li> <li>▪ Kehutanan (<i>Forestry</i>) (9)</li> <li>▪ Perkebunan lainnya (<i>Other crops estate</i>) (5)</li> </ul>	<p>Kelapa sawit oleh perusahaan swasta (<i>Oil palm by big company</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkebunan campuran (<i>Mixed plantation</i>) (16)</li> <li>▪ Pertanian (<i>Agricultural</i>) (14)</li> <li>▪ Kehutanan (<i>Forestry</i>) (5)</li> <li>▪ Perikanan (<i>Fisbery</i>) (3)</li> </ul>	<p>Perkebunan campuran oleh masyarakat (<i>Mixed plantation by community</i>)</p>

Keterangan: n = Jumlah aktor yang berpartisipasi dalam evaluasi pemanfaatan lahan gambut  
(Remarks): (n = Total actors participated in the evaluation of peatland utilization)

Manifestasi aksi kolektif dalam penelitian ini dilihat dari hubungan antara fakta lapangan dengan perspektif preferensi para aktor terhadap bentuk usaha yang paling diinginkan untuk lahan gambut. Dalam kasus Kabupaten OKI, usaha kebun kelapa sawit dapat disebut sebagai manifestasi aksi kolektif, karena terdapat hubungan antara fakta di lapangan dengan preferensi para aktor. Sementara itu, di aksi kolektif di Tanjabar menghasilkan perkebunan campuran.

Karakteristik-karakteristik kelembagaan dan sosial ekonomi yang dinilai oleh para aktor dianggap mempengaruhi keputusan dalam melakukan aksi pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI maupun Tanjabar ditampilkan dalam Tabel 3. Lebih dari 100 ribu hektar lahan gambut di Kabupaten OKI yang kini diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan swasta tidak terlepas dari keberadaan faktor-faktor kelembagaan (institusi) yang mendukung dan struktur sosial ekonomi yang sesuai dengan harapan parapihak.

Tabel 3. Hasil evaluasi faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap keputusan pemilihan bentuk pemanfaatan lahan gambut

Table 3. Evaluation results of institutional and social economic factors that influence on choice decisions in peatland utilization

Faktor-faktor Sosial Ekonomi dan Kelembagaan yang berpengaruh ( <i>Social-Economic and Influenced Institutional factors</i> )	Jumlah pihak yang mendukung (%) ( <i>Total of body supported (%)</i> )	
	OKI (n = 33)	Tanjabar (n = 16)
Kemudahan proses perizinan	57,58	75
Kepuasan kinerja pola pemanfaatan	39,39	43,75
Anggapan kesesuaian lahan	78,79	68,75
Dukungan aturan	72,73	75
Kemudahan monitoring	63,64	75
Rendahnya resiko klaim lahan oleh pihak lain	69,70	75
Kemudahan membuat batas	84,85	75
Anggapan ramah lingkungan	69,70	43,75
Penerimaan sosial pilihan usaha	96,97	93,75
Kemudahan memobilisasi massa	57,58	50
Budaya bekerjasama	81,82	93,75
Keberadaan individu sebagai teladan	30,30	68,75
Kesesuaian dengan norma dan budaya	78,79	87,50
Dukungan tenaga kerja	90,91	87,50
Keberadaan pasar bagi produk akhir	66,25	81,25
Rendahnya biaya penguasaan teknologi	27,27	68,75

Dukungan birokrasi dalam pemerintahan Kabupaten OKI dan banyaknya pengusaha yang tertarik untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit di lahan Gambut OKI dimungkinkan oleh tingginya penerimaan sosial untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Parapihak mempercayai bahwa usaha kelapa sawit adalah sesuatu yang menguntungkan dan keterlibatan mereka untuk mendukung usaha tersebut diyakini tidak sia-sia. Ini terjadi pula untuk kasus perkebunan campuran yang dibuat oleh masyarakat di Kabupaten Tanjabar. Masyarakat meyakini bahwa komoditas maupun pola tanam yang mereka gunakan adalah yang terbaik untuk usaha di lahan gambut.

Faktor kelembagaan lainnya yang dipertimbangkan parapihak mempengaruhi tindakan mereka mendukung usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten OKI adalah kemudahan membuat batas. Usaha perkebunan kelapa sawit di lahan gambut membutuhkan biaya cukup tinggi, terutama dalam hal penyiapan lahan berupa pembuatan saluran pembuangan air atau disebut kanal. Kanal utama biasanya berfungsi tidak hanya sebagai aliran keluar (outlet) bagi kanal-kanal sekunder namun berperan pula sebagai batas lahan usaha. Kanal-kanal ini karena dibuat dalam biaya cukup tinggi, maka dapat berfungsi sebagai penanda penguasaan lahan yang jelas. Dalam kasus pembuatan kebun campuran di Tanjung Jabung Barat, kanal-kanal dibuat secara gotong-royong oleh sekumpulan orang. Sekumpulan orang tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya

komunitas, misalnya sebuah dusun, yang membatasi komunitasnya dengan pihak lain melalui batas kanal (atau disebut parit).

Faktor sosial utama yang disebut parapihak berpengaruh dalam terbentuknya usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten OKI adalah keberadaan budaya bekerjasama dan anggapan kesesuaian usaha dengan norma dan budaya setempat. Budaya bekerjasama antar elit birokrasi, pengusaha dan masyarakat lokal di Kabupaten OKI mendukung terbentuknya usaha-usaha perkebunan kelapa sawit saat ini. Budaya bekerjasama adalah disebut dominan oleh parapihak di Tanjabar, karena perkebunan campuran dibentuk oleh sekumpulan orang. Sekumpulan orang tersebut meskipun berbeda suku, seperti banjar, jawa, dan melayu, namun memiliki keinginan yang sama untuk mengubah lahan gambut menjadi lahan usaha produktif.

Dukungan tenaga kerja adalah faktor ekonomi utama yang mendorong parapihak untuk mendukung terbentuknya usaha perkebunan kelapa sawit di OKI maupun usaha perkebunan campuran di Kabupaten Tanjabar. Bagi pengusaha, tersedianya tenaga kerja dari masyarakat yang tinggal di sekitar lahan usaha merupakan faktor ekonomi utama yang akan membantu skala usahanya. Bagi pemerintah daerah, usaha perkebunan kelapa sawit yang mensyaratkan keberadaan pola inti-plasma akan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Keberadaan pasar bagi produk akhir adalah faktor ekonomi lain yang mempengaruhi pilihan pola pengusahaan lahan gambut di kedua kabupaten. Faktor ini lebih dipercaya oleh parapihak Tanjabar dibandingkan dengan oleh parapihak OKI. Masyarakat Tanjabar memanfaatkan lahan gambut menjadi perkebunan campuran dan pilihan komoditasnya karena didorong oleh faktor permintaan pasar (*demand driven*).

### 3.2. Pembahasan

Lahan gambut di Kabupaten OKI mengalami dinamika penutupan lahan. Pada era tahun 2000an, sebagian besar lahan gambut di Kabupaten OKI merupakan hamparan lahan bekas terbakar yang ditumbuhi oleh rumput, paku-pakuan, dan semak. Areal ini menjadi wilayah yang mengalami kebakaran berulang sehingga dianggap sebagai areal tidak bermanfaat dan sumber masalah. Berbagai kajian, diskusi dan usaha telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten OKI untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut sekaligus menekan resiko terjadinya kebakaran lahan. Pada tahun 2004 lahan gambut yang berada dalam kawasan hutan produksi dimanfaatkan sebagai areal hutan tanaman industri (HTI). Pemanfaatan lahan gambut sebagai areal usaha produktif dianggap sebagai solusi untuk merehabilitasi lahan yang telah rusak. Hutan tanaman industri yang ada dalam kawasan hutan dianggap sebagai solusi upaya rehabilitasi. Perkebunan kelapa sawit masih dianggap cara yang paling memungkinkan untuk memanfaatkan hamparan lahan gambut rentan terbakar ini. Upaya rehabilitasi melalui hanya penanaman pohon saja selain tidak bisa dilakukan dalam skala luas karena keterbatasan biaya juga seringkali gagal karena tidak terpelihara.

Atribut struktur arena, institusi, dan aktor yang kini melekat pada lahan gambut di Kabupaten OKI adalah gambaran tentang fakta lapangan saat ini. Upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon akan efektif dan adaptif apabila menyesuaikan dengan atribut-atribut tersebut. Pendekatan ini menjadi berarti apabila tidak terjadi perubahan nyata pada

faktor-faktor di luar jangkauan kemampuan parapihak di OKI (misalnya perubahan peraturan perundangan nasional, ilmu pengetahuan baru, dan lainnya). Rehabilitasi lahan gambut berbasis penanam pohon akan menjadi eksklusif apabila tidak menyesuaikan dengan karakteristik dan cara berpikir parapihak.

Parapihak yang berperan sebagai *players* dan memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI seperti Dinas Perkebunan dan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta memiliki potensi besar untuk dilibatkan dalam upaya rehabilitasi lahan gambut. Berdasarkan hasil penelitian ini, paling tidak terdapat tiga pintu masuk utama untuk kegiatan rehabilitasi berbasis pohon, yakni melalui jalur birokrasi terutama Dinas Perkebunan, perusahaan perkebunan swasta, dan masyarakat desa yang tinggal di sekitar lahan gambut.

Selama ini, upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon hanya melalui Dinas Kehutanan saja. Pelibatan masyarakat hanya sebatas tenaga kerja yang membantu pekerjaan di lapangan. Belajar dari pengalaman terbentuknya kebun campuran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, pada dasarnya masyarakat dapat diandalkan untuk mengubah lahan gambut yang telah rusak menjadi tertanami dengan beragam jenis tumbuhan produktif.

Faktor-faktor utama yang layak diperhatikan sebagai pemungkin dilibatkannya banyak pihak dalam upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon adalah penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas. Kedua faktor ini, tanpa harus mengabaikan faktor kelembagaan lainnya, dalam kasus pemanfaatan lahan gambut di OKI dapat mempengaruhi perilaku aktor atau menjadi insentif tidak langsung untuk melibatkan parapihak dalam upaya rehabilitasi lahan gambut.

Penerimaan sosial (*social acceptance*) terhadap sebuah usaha merupakan atribut yang melekat pada sebuah entitas sosial. Ini dapat diartikan pula bahwa usaha tersebut memiliki modal sosial (*social capital*) untuk berkembang dalam sebuah entitas sosial. Menurut Krishna (2007), modal sosial bersifat sebagai *stock*, peubah yang mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan peubah lainnya. Hasil Penelitian Krishna selama tujuh tahun di India menyingkapkan bahwa modal sosial dapat berubah karena usaha-usaha yang dilakukan oleh internal kelompok masyarakat. Organisasi-organisasi yang ada dalam kelompok masyarakat dan para pemimpinya dapat membantu pertumbuhan modal sosial.

Upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon selayaknya menempatkan faktor penerimaan sosial sebagai program awal aktivitas rehabilitasi. Apabila Kabupaten OKI diasumsikan sebagai entitas sosial, maka organisasi-organisasi internal yang ada dalam kabupaten harus diyakinkan terlebih dahulu tentang keberhasilan dan nilai manfaat program rehabilitasi. Dalam konteks kabupaten, bupati sebagai kepala daerah memegang peran penting dalam penerimaan sosial ini. Program yang disampaikan langsung secara terus menerus oleh seorang bupati akan mendorong aksi kolektif para pihak yang ada di bawahnya.

Kemudahan dalam membuat batas adalah faktor dominan lainnya yang disebut parapihak mempengaruhi tindakan mereka dalam mendukung terbentuknya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten OKI. Lahan gambut yang telah rusak terlihat sebagai hampanan luas rumput atau semak. Jika tanpa batas yang jelas, maka akan sulit membedakan batas-

batas penguasaan sumberdaya. Usaha perkebunan kelapa sawit yang mendahulukan pembuatan kanal-kanal air dianggap dapat membatasi areal penguasaan antarperusahaan atau antarindividu. Kanal tidak hanya dapat berperan sebagai batas fisik antarlahan namun batas hak antaraktivitas parapihak.

Batas-batas yang jelas (*clearly defined boundaries*) disebut oleh banyak pakar sebagai faktor kelembagaan utama menuju keberhasilan pengelolaan sumberdaya umum yang berkelanjutan (Agrawal, 2001). Batas-batas yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian tentang siapa yang akan mendapat keuntungan dan siapa yang harus mengeluarkan biaya (Gibson *et al.*, 2005). Kanal-kanal yang dibuat dalam kasus kebun kelapa sawit di OKI maupun kebun campuran di Tanjung Jabung Barat dapat mengurangi biaya-biaya untuk monitoring dan penegakan (*enforcement*) batas hak-hak penguasaan sumberdaya lahan gambut, baik oleh korporasi maupun individu.

Upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon untuk mengundang dukungan banyak pihak tidak bisa hanya dilakukan melalui aktivitas penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon saja, namun harus ada kejelasan tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat dari usaha itu dan siapa yang harus mengeluarkan biaya (termasuk tenaga kerja) guna mencapai kemanfaatan tersebut. Cara mudah dan cepat untuk beradaptasi dengan “batas-batas yang jelas” adalah dengan mengintroduksi program rehabilitasi ke dalam aktivitas yang telah dilakukan oleh para pihak, misalnya penanaman pohon-pohon rehabilitasi di antara barisan tanaman kelapa sawit, atau dengan mengenalkan budidaya tanaman pohon rehabilitasi multiguna kepada masyarakat pemanfaat lahan gambut.

Faktor sosial ekonomi dominan yang mempengaruhi keberhasilan aksi kolektif pemanfaatan lahan gambut merupakan atribut struktur arena atau penciri *playing field* semua aktivitas pemanfaatan lahan gambut, termasuk upaya rehabilitasi. Ini dapat menjadi dasar dalam pemilihan jenis-jenis pohon atau pola teknis kegiatan rehabilitasi.

Upaya pemanfaatan lahan gambut dangkal yang terdegradasi dengan rehabilitasi berbasis pohon dapat meningkatkan fungsi lingkungan dan pencegahan kebakaran. Introduksi beragam jenis pohon merupakan upaya memperkaya keragaman jenis dan meningkatkan nilai ekonomi lahan gambut sehingga mengurangi resiko terjadinya pembakaran lahan gambut dengan dalih pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

1. Parapihak yang dapat berperan penting dalam aksi rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Dinas Perkebunan, Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Swasta, dan masyarakat desa-desa di sekitar lahan gambut. Parapihak ini adalah para pemain yang memiliki kepedulian dan akan terlibat secara terus menerus dalam aktivitas di lahan gambut luar kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Faktor-faktor utama yang layak diperhatikan sebagai pemungkin dilibatkannya banyak pihak dalam upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon adalah

penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas.

3. Faktor sosial ekonomi seperti budaya bekerjasama, anggapan kesesuaian usaha dengan norma dan budaya setempat, dukungan tenaga kerja, dan keberadaan pasar bagi produk akhir komoditas yang diintroduksi adalah penciri utama arena aktivitas yang ada di lahan gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### 4.2. Saran

1. Parapihak yang telah teridentifikasi sebagai pemain utama dalam aktivitas pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penelitian ini layak untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, rapat-rapat pembahasan dalam rangka program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Langkah awal untuk melibatkan banyak pihak dalam program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan keyakinan parapihak terhadap kemanfaatan, tingkat keberhasilan, kejelasan siapa mendapatkan apa dan memberikan apa dalam sebuah program jangka panjang menuju hasil akhir. Langkah praktis lanjutan yang layak dikerjakan adalah dengan mensinergiskan aktivitas rehabilitasi dengan usaha yang telah dilakukan parapihak di lahan gambut, misalnya membuat pola rehabilitasi berbasis pohon di antara tanaman kelapa sawit atau dalam petak-petak kanal yang telah dibuat parapihak.
3. Pemilihan jenis komoditas pohon untuk program rehabilitasi dan model aktivitasnya sebaiknya memperhatikan faktor sosial ekonomi dominan yang menjadi atribut arena aktivitas pemanfaatan lahan gambut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. 2001. Common property institution and sustainable governance of resources. *World Development*, Vol. 29, No. 10, pp. 1649-1672.
- Da Silva, P.P. 2004. From common property to co-management: lessons from Brazil's first maritime extractive reserve. *Marine Policy*, Vol. 28, No. 4, pp. 419-428.
- Daryono, H. 2006. Pengelolaan Hutan Rawa Gambut secara Bijaksana dalam Rangka Menjaga Kelestariannya. Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.
- Gibson, C.C., J.T. Williams and E. Ostrom. 2005. Local enforcement and better forests. *World development*, Vol. 33, No. 2, pp. 273-284.
- Krishna, A. 2007. How does social capital grow? A seven-year study of villages in India. *The Journal of Politics*, Vol.69, No. 4, pp. 941-956.

- Lubis, I.R. 2006. Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Dipandang dari Aspek Konservasi: Pengalaman Kegiatan CCFPI di Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.
- Matsaert, H. 2002. Institutional Analysis in Natural Resource Research. Socio-economic Methodologies for Natural Resources Research. Chatham, UK: Natural Resources Institute.
- Meinzen-Dick, R., M. DiGregorio and N. McCarthy. 2004. Methods for studying collective action in rural development. *Agricultural Systems*, Vol. 82, No. 3, pp. 197-214.
- Mitroff, I. and H. Linstone. 1993. *The Unbounded Mind*. New York: Oxford University Press.
- Pemkab OKI [Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir] dan PPMAL UNSRI [Pusat Penelitian Manajemen Air dan Lahan]. 2006. Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Rawa Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kayu Agung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Quinn, C.H., M. Huby, H. Kiwasila and J.C. Lovett. Design principles and common pool resource management: An institutional approach to evaluating community management in semi-arid Tanzania. *Journal of Environmental Management*, Vol. 84, pp. 100-113.
- Sato, G. 2005. Forestry Sector Reform and Distributional Change of Natural Resource Rent in Indonesia. *Journal of Developing Economics*, Vol. XLIII, No. 1, pp. 149-170.
- Thomson J.T. and K.S. Freudenberger. 1997. *Crafting Institutional Arrangements for Community Forestry. Forests, Trees and People, Community Forestry Field Manual 7*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Wahyunto, S. Ritung, Suparto dan H. Subagjo. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Wibisono, I.T.C., L. Siboro, dan I.N.N. Suryadiputra. 2005. Panduan Rehabilitasi dan Teknik Silvikultur di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International-IP.
- Zulfikhar. 2006. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Rawa Gambut dengan Pola KPH di Provinsi Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.